

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PT.VALE
DALAM PENGADAAN PENERANGAN LISTRIK 24 JAM DI
DAERAH PESISIR KABUPATENLUWU TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2022**

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PT.VALE
DALAM PENGADAAN PENERANGAN LISTRIK24 JAM DI
DAERAH PESISIR KABUPATENLUWU TIMUR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RUSTAM

Nomor Stambuk: 105640206915

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

20212

09/02/2022

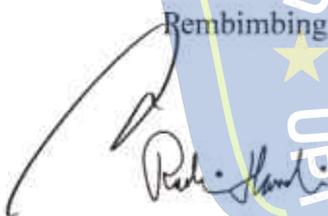
1 exp
Smb. Alumni

R/0046/1PM/22.0
RUS
5

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Modalitas Kemenangan Sutinah Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Mamuju
Nama : Ardiansyah Ahmad
Nomor Stambuk : 10564110416
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Rembimbing I



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Menyetujui,

Mengetahui,

Dekan



Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM: 1031 102

PENERIMAAN TIM

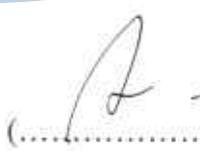
Telah diterima oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 03/FSP/A.4-II/I/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang di laksanakan di Makassar pada hari Selasa, 11 Januari 2021.

TIM PENILAI

Ketua	Sekertaris
 <u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM : 730772	 <u>Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u> NBM : 992797

PENGUJI:

1. Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)  (.....)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd  (.....)

3. Nur Khaerah, S. IP., M. IP  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rustma

Nomor Stambuk : 105640206915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 13 Juni 2021

Yang Menyatakan,



RUSTAM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	ii
HALAM PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Sinergitas.....	9
C. Pemerintah Daerah.....	17
D. Pemangku Kepentingan	18
E. Kerangka Pikir.....	19
F. Fokus Penelitian.....	19
G. Deskripsi Pokus Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23

E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Tekni Analisis Data.....	24
G. Keabsahan Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	34
B. Sinergitas Pemerintah dan PT. Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam didaerah pesisir Kab. Luvu Timur	38
C. Pembahasan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 26



ABSTRAK

RUSTAM (2021) SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PT.VALE DALAM PENGADAAN PENERANGAN LISTRIK 24 JAM DI DAERAH PESISIR KABUPATENLUWU TIMUR (Dibimbing oleh H. Ansyari Mone, dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu. Tipe penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan observasi dan wawancara. program pengadaan listrik 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah untuk bagaimana masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam. Dalam pelaksanaan pengadaan listrik 24 jam tersebut, sumber tenaga yang digunakan adalah PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini, dimana masyarakat diberikan tugas untuk bagaimana menjaga agar sarana yang dipergunakan untuk membangkitkan listrik yang di salurkan ke daerah pesisir dapat berfungsi dengan baik. Pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, masyarakat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di libatkan langsung dalam program tersebut, karena Pemerintah menilai bahwa keberadaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung sangat dibutuhkan. Operasi PLTA yang dilakukan oleh PT Vale dan Pemerintah jelas memberikan dampak yang sangat besar, karena dapat memasok kebutuhan listrik yang sangat besar.

Keybord : Sinergitas, pemerintah daerah, Penerangan listrik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul “sinergitas pemerintah daerah dan pt.vale dalam pengadaan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir kabupatenluwu timur ” dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karyaini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengankalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan Salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasehat agama.

Tidak lupa penulis menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya danpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Untuk ke dua orang tua saya atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan diakhirat.
2. Ayahanda Drs. H. Ansyari Mone, S.Pd selaku pembimbing I dan Haerdianto Hawing, ST., M.A sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas IlmuSosial Ilmu Politik Univetrsitay Muhammadiyah Makassar.
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda dan ibunda dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas IlmuSosial dan IlmuPolitik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Keluargaku, kakaku yang selama ini telah mensyuport dan memberikan semangat untuk tetap melanjutkan kuliah saya hingga selesai.
8. Teman-teman kelas IP.A yang selama ini menemani selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar..

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

WassalamualaikumWr, Wb

Makassar, 02 Januari 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Prinsip desentralisasi pemerintahan, menurut pasal 2, ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa dengan kewenangan yang

dilimpahkan kepada daerah, meliputi penyusunan kebijakan-kebijakan, memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara optimal dan masih jauh dari harapan.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Nasional melalui amandemen UUD 1945 oleh MPR RI, maka praktis tidak ada aturan atau landasan kebijakan perencanaan pembangunan komprehensif yang bersifat mengikat antar daerah, provinsi maupun nasional. Hal ini dapat mendorong otoritas daerah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan sepihak yang hanya menguntungkan wilayahnya, tanpa melakukan koordinasi dengan wilayah lain terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Guna mengatasi kondisi tersebut, maka dikeluarkan Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem tersebut dimaksudkan untuk menjalin koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, propinsi maupun nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan. Disamping itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Keberhasitan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh kualitas sinergi atau kerjasama kreatif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Perpaduan peran dan fungsi pemangku kepentingan dimaksud, menjadi modal dasar untuk terwujudnya sinergi, dimana pemerintah memantapkan peran fungsinya sebagai perencana dengan memadukan kemampuan teknis perencanaan, swasta memantapkan perannya dalam memberikan kajian profesional tentang situasi dunia usaha dan pasar, sementara masyarakat memberikan informasi yang nyata atas kondisi riil yang berkembang di masyarakat serta berperan dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi pembangunan.

Menurut Kunarjo (2002), bahwa proses perencanaan sebenarnya mempunyai tahapan yang panjang dan dapat diperas menjadi (1) Tahap penyusunan rencana ; (2) Tahap Pelaksanaan ; dan (3) Tahap evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut apabila tidak dikoordinasikan dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Konflik atau benturan kepentingan antara kelembagaan tidak dapat dihindari. Pemangku kepentingan hendaknya memahami tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan, untuk itu diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan (sinergitas) dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Administrasi Negara (2000) menyatakan bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif maka harus menjaga kesinergisan interaksi yang positif

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sejalan dengan tersebut, Price dalam (Wahab, 1997) dan UNDP dalam (Widodo, 2001) sependapat bahwa sinergi antar pemangku kepentingan dapat diwujudkan dalam perumusan kebijakan, dengan menggunakan instrumen membangun kebersamaan antar aktor dalam perumusan kebijakan yang memanfaatkan kekuatan masing masing aktor melalui kerjasama yang kreatif.

Dunia usaha pertambangan saat ini menghadapi kondisi yang penuh tantangan, harga-harga komoditi di pasar internasional cenderung turun dan biaya produksi yang semakin meningkat, hal ini tentunya akan menggerus keuntungan perusahaan. Agar tetap bertahan di lingkungan bisnis yang seperti ini, organisasi harus melakukan berbagai langkah antisipasi seperti, memperbaiki proses produksinya, menggunakan sumber energi yang lebih murah, perbaikan sistem organisasi, dan melakukan penghematan biaya.

PT.Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil, sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), perusahaan ini telah mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di Sorowako, Sulawesi, sejak tahun 1968. Saat ini, menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. Sejak awal beroperasi PT. Vale Indonesia Tbk (PT.Vale) telah memegang visi sebagai perusahaan tambang yang peduli terhadap kelangsungan alam. Memproduksi nikel dengan penerapan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan termasuk dalam menciptakan energi bagi kebutuhan produksi melalui

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Setelah lebih dari empat dasawarsa beroperasi, kini PT.Vale memiliki tiga PLTA yakni, Larona, Balambano, dan Karebbe yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik untuk mengoperasikan furnace (tanur peleburan dan pengolahan bijih nikel) di pusat pengolahan (process plant) di Sorowako.

Untuk sumber tenaganya, PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti.

Di sisi lain, ketiga PLTA juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir melalui sistem kontrol di pintu-pintu air tersebut. Hal itu diketahui bila curah hujan tinggi, debit air sungai dapat meluap dan dapat berdampak pada pemilik area pertanian di daerah hulu. Berdasarkan data 5 tahun terakhir mengenai peningkatan fungsi operasi peralatan pembangkit listrik tenaga air yang ada di 3 lokasi PLTA yaitu Larona, Balambano dan Karebbe telah terjadi peningkatan/improvement yang cukup signifikan melalui penambahan atau perbaikan peralatan yang ada. Kondisi ini mengharuskan personel operator yang ada harus mampu bersinergi dengan system yang ada sesuai dengan visi dan misi dari Department Operation Of Hydro Plant. Akibat kondisi harga komoditas nikel di pasaran global dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus menurun membuat secara global PT.Vale Indonesia membatasi pelatihan teknis

bagi karyawan yang ada saat ini, padahal di satu sisi pelatihan ini sangat di butuhkan bagi karywan khusus nya di department *Utilities operation of hydro plant* agar visi dan misi. department tersebut dapat terus sejalan dengan strategi operasional yang di terapkan sehari-hari.

Permasalahan utama yang di hadapi oleh masyarakat dipesisir Kabupaten Luwu Timur adalah dimana masyarakat tidak merasakan yang namanya penerangan listrik selama 24 jam seperti di daerah lainnya. Padahal seharusnya penerangan listrik selama 24 jam dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Hal utama yang menjadi kendala adalah daerah pesisir tersebut sangat sulit untuk di jangkau sehingga sangat sulit untuk di lakukan pengadaan penerangan listrik karena daerah tersebut merupakan daerah pergunungan yang sulit untuk di jangkau.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Sinergitas Pemerintah Daerah dan PT.VALE Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah " Bagaimana Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT.Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur".

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “ Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT.Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk Mahasiswa yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dari Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT. Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT.Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Tery Tresna Purnama, 2019 Judul penelitian implementasi sinergitas kemitraan insan litbang atmil dalam mewujudkan *The World Class Military Academy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sinergitas kemitraan insan litbang atmil sangat berperang dalam mewujudkan atmil menjadi *The World Class Military Academy*, upaya yang dilakukan yakni lisan litbang Atmil setara individu, kelompok maupun organisasi bersinergi dan bermitra dengan peneliti lain. Atmil sebagai lembaga pendidikan militer dengan kompetensi yang baik membangun Mou dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan kompetensi.
- 2) Hadi Ranga Loh, 2016 judul penelitian relasi Negara, Bisnis, dan Masyarakat (Implementasi Program terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale Indonesia Tbk di Desa Malili Kab. Luwu Timur), menunjukkan bahwa analisis Implementasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT.Vale Indonesia Tbk, memberikan dampak positif bagi Masyarakat setempat seperti memberikan bantuan pelatihan-pelatihan khusus kepada Masyarakat petani, serta bantuan pupuk, traktor dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dan relasi Negara dan Bisnis dalam hal ini pemerintah dan Perusahaan PT.Vale sma-sama saling menguntungkan dimana PT.Vale

mendukung program –program Pemerintah PT.Vale membutuhkan pemerintah untuk legitimasi dalam melakukan aktivitas penambangan.

- 3) Reynold Mubarak, 2018 judul penelitian sinergitas pemerintah desa dan perusahaan dalam Penerapan *Corporate social responsibility (csr)* Pt. Xiv Nusantara (Persero) di desa Wanua waru Kec. Libureng Kab. Bone, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan turut bekerjasama dalam penetapan program CSR di desa Wanua waru tersebut. Beberapa Program yang dilaksanakan oleh perusahaan juga turut mengambil campur tangan dengan program kerja pemerintah desa yaitu perbaikan jalan, turnamen olahraga, perekrutan pekerja, lingkungan. Sinergitas antara masyarakat dan perusahaan yang sangat baik ini menjadikan factor-faktor penghambat penerapan CSR tersebut terminimalisir sehingga lingkungan dari masyarakat menjadi nilai penting dari perusahaan itu sendiri.

Persamaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat. Perbedaanya adalah peneliti lebih cenderung kepada sinergitas pemerintah dengan PT.Vale dalam pengadaan penerangan Listrik yang lebih berfokus kepada bagaimana pemerataan pembangunan melalui kerja sama antara Pemerintah setempat dan PT.Vale melalui penerangan Listrik 24 Jam di daerah pesisir, sedangkan penelitian tersebut memiliki lokasi penelitiannya tersendiri.

B. Sinergitas

1. Konsep Sinergitas

Sinergitas mempunyai beberapa pengertian atau definisi tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus saku *Oxford-Inggris* (<http://www.encyclopedia.com>) bahwa sinergitas adalah interaksi atau kerja sama antara dua atau lebih suatu organisasi, unsur atau agency untuk menghasilkan kombinasi hasil kinerja yang lebih besar daripada jumlah hasil yang dikerjakan secara sendiri-sendiri, seperti dalam teks aslinya.

Menurut Covey's (2008), sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri.

Sinergitas merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang - orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri (Anonim, 2008).

Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergi berbeda

dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama.

Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut Mulyana (2007) adalah bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari : kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas.

Dari beberapa pengertian menunjukkan bahwa sinergitas sangat penting dalam kelompok atau tim, organisasi maupun suatu *agency* karena dengan bekerja secara sinergi akan menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang dihasilkan apabila dikerjakan secara sendiri (*The whole is greater than the sum of its parts*).

Selanjutnya menurut Covey's (2008) menyatakan bahwa kekuatan sinergitas tersusun oleh : (1) Kerjasama kreatif dalam lingkungannya, (2) Partisipasi dan Kesepahaman, (3) Aplikasi Praktis, dan (4) Penilaian terhadap perbedaan. Adapun masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerjasama Kreatif

Sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan. Ada dua cara dimana setiap bagian menghasilkan nilai-nilai maksimum, yaitu:

1. Membangun kekuatan setiap anggota kelompok.

2. Saling mendukung, atau saling berbagi untuk kepentingan bersama, menerima kelemahan atau kekurangan masing-masing.

Dalam hal ini saling berbagi diwujudkan dalam berbagi ide, informasi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dan lainnya. Disinilah kekuatan dari sinergitas itu dapat ditemukan, tanpa kesediaan untuk saling berbagi sinergitas tidak bisa terlaksana. Disamping itu guna membangun kerja sama dalam suatu kelompok, sinergi memerlukan unsur pendukung lainnya, yakni anggota kelompok hendaknya mempunyai sikap atau tingkah laku (behavior) yang positif, suportif, tidak egois, pasif, tertutup, atau bahkan kompetitif dan saling menjatuhkan (Anonim, 2006).

b. Partisipasi dan Kesepahaman

Berpikir menang-menang (*win 1 win concept*) menjadi motivasi dalam bekerja bersama guna mewujudkan tujuan yang diinginkan atau memahami nilai-nilai perbedaan masing-masing anggota. Dalam bersinergi, tidak ada pihak yang harus kalah dan tidak ada pihak yang harus dirugikan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergitas semua pihak harus saling berpikir positif untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk meraih kemenangan.

Interaksi saling memahami menjadi keharusan dalam meningkatkan partisipasi. Bersinergi secara kreatif merupakan proses sulit yang memerlukan pola pikir baru dari seluruh anggota. Hal ini memerlukan

kesepakatan baru antar anggota dan atmosfer perlindungan terhadap anggota dalam menjalankan secara operasional. Pengamatan hal ini dalam aksinya akan menjadi keunggulan tersendiri, seperti halnya keterlibatan anggota dalam proses kreatifitas.

Kreatifitas, inovasi, dan kejujuran dalam kerjasama dapat meningkat secara tajam dan tidak dikenal dalam tingkatan efektifitas sebelumnya saat anggota-anggota kelompok berkeinginan dan diberdayakan dalam menampilkan kekuatan sinergi. Beberapa faktor positif yang mempengaruhi proses sinergitas adalah : (1) kepercayaan, (2) keterbukaan, (3) Transparansi, (4) saling menghormati, (5) pengakuan jasa, (6) persahabatan dan (7) ketulusan. Pada sisi lain lingkungan kompetitif yang tinggi antar anggota kelompok dapat mengkhawatirkan dan mempengaruhi perkembangan sinergitas. Kompetisi antar anggota kelompok dalam bekerja menuju ke arah sebaliknya, yakni dapat mengurangi efektifitas masing-masing anggota, karena sinergitas tidak didorong melalui kompetisi atau penghargaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka faktor-faktor negatif yang mempengaruhi sinergitas adalah : (1) minimnya komunikasi, (2) kurangnya pemahaman, (3) Aturan yang tidak terdefinisi, (4) Tidak ada kejelasan sasaran, (5) Pemimpin yang tidak berpengalaman, (6) manuver politik, (7) perfeksionisme dan (8) konflik-konflik nilai perseorangan.

c. Aplikasi Praktis

Untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari

suatu persaingan antar kelompok. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan dengan prinsip sinergitas harus memulai pekerjaan dengan pemikiran "kami". Dengan prinsip ini perasaan emosional dalam pekerjaan menjadi ukuran kemajuannya, dan ketulusan anggota secara langsung akan menjadi modal utama.

d. Menghargai Perbedaan

Perbedaan antara masing-masing individu meliputi : mentalitas, sosial, spiritual, ekonomi dan masih banyak yang lainnya adalah merupakan keadaan yang ada di alam semesta. Bagian terbesar adalah untuk memahami kebanyakan orang atas persepsinya yang tidak sama dalam berbagai hal. Perbedaan pemikiran masing-masing orang atas pemahamannya tentang dunia adalah semuanya benar, permasalahannya adalah keuntungan apa yang diperoleh dalam melihat dunia tersebut. Perwujudan dari perbedaan nilai-nilai dari masing-masing anggota merupakan esensi dari "sinergi".

Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan sinergitas umumnya memiliki perbedaan keunikan (ketrampilan, pengetahuan, pengalaman, kepribadian). Dari perbedaan-perbedaan yang unik inilah kemudian dijalin kerja sama kreatif yang menghasilkan alternatif dan memberikan keuntungan optimal bagi pihak-pihak yang bersinergi.

Covey's (2008) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki perbedaan kultural, pendidikan, keilmuan dan usaha akan membawa kerangka pemikiran berlainan dalam memandang permasalahan serta

memecahkan permasalahan tersebut, melalui perpaduan percampuran ide secara dinamis. Dalam hal ini anggota kelompok membangun kompetensi pada kreatifitas individu dan mengembangkan sinergitas diantara kelompok, kemudian membuat kelompoknya lebih produktif secara bersamaan. Pendapat lainnya menurut Ross, L.G. (2003) bahwa untuk mewujudkan sinergitas dalam organisasi, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah

- 1) Mengembangkan pendekatan visioning, perencanaan dan tanggung jawab dalam kelompok.

Sinergitas dapat terjadi pada suatu kelompok hanya ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini mengharuskan setiap anggota dalam kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok secara keseluruhan dengan nilai-nilai, arah ke depan dan misi yang diemban.

Selanjutnya sinergitas mengharuskan seluruh anggota merasa ada kesamaan visi dan menyetujui strategi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu hal yang dibutuhkan dalam organisasi adalah :

- a) Menyediakan waktu bagi anggota kelompok untuk menjamin kesamaan pemahaman tentang visi, sasaran, perencanaan dan nilai-nilai yang menyertainya.

- b) Melakukan konsesus-konsesus untuk melakukan strategi pengembangan dan pengambilan keputusan. Hal ini menyediakan setiap anggota berkesempatan untuk mempengaruhi hasil keputusan.
- c) Mendorong seluruh tim untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggung jawab.

2) Menilai seluruh anggota kelompok secara sama

Untuk mencapai sinergitas, kondisi lingkungan organisasi sangat menentukan dan menghindari terjadinya kompetisi. Untuk itu agar suasana lingkungan organisasi dapat terpelihara berkelanjutan, maka:

- a) Menunjukkan dalam organisasi bahwa seluruh anggota kelompok adalah bagian penting menuju kesuksesan organisasi.
- b) Menghindari penilaian sepihak, sebaliknya justru harus mendorong seluruh anggota belajar dari kesalahan atau permasalahan.
- c) Seorang pemimpin harus menghindari dalam mengevaluasi anggota kelompok relatif lebih baik dari kelompok lain atau menganggap kelompok satu lebih penting daripada kelompok lainnya.
- d) Membantu anggota untuk memahami kepentingan tugas spesifiknya dan kaitannya dengan kegiatan keseluruhan dalam organisasi.

3) Berusaha menjaga dan memelihara saling percaya

Percaya berarti anggota kelompok mempunyai harapan yang sama bahwa tujuan bersatunya adalah tidak akan melakukan segala sesuatu atas dasar kesalahan dengan sengaja. Kepercayaan tidak dapat bertahan lama melalui kekuatan dan pengawasan seperti pada paradigma tradisional. Strategi pengawasan memerlukan tindakan, kekuatan dan kebohongan untuk mempertahankan bayangan-bayangan kekuatan di atas kekuatan yang lain.

Untuk memperoleh agar seluruh anggota bertanggung jawab secara struktural dalam kelompok, maka tim operasional bertanggung jawab untuk:

- a) Secara terus menerus berusaha memadukan kepentingan anggota kelompok.
- b) Secara psikis, emosional dan psikologi mendukung antara anggota satu dengan anggota lainnya.
- c) Keterbukaan dan kejujuran komunikasi.
- d) Meluangkan kesempatan untuk membuat momentum persahabatan diantara anggota (seperti kegiatan sosial, merayakan ulang tahun, mendiskusikan nilai-nilai kemanusiaan, hobi, impian-impian, dan curah pendapat tentang kehidupan).

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.

Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antaralain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan.

Lembaga legis latif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografî yang luas dan kondisi sosol budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan

daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan (Hanafi Nurcholis, 2005).

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan Negara. C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan

Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang No. 24 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

D. Pemangku Kepentingan

Menurut Hornby (1995) Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai perorangan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki andil atau perhatian dalam bisnis atau industri. Dalam implementasi program pemangku kepentingan memiliki banyak pengertian, istilah pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, di mana mereka berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan tersebut. Hal ini perlu disadari, mengingat masyarakat tidak selalu menerima dampak secara adil. Sebagian masyarakat mungkin menanggung biaya dan sebagian masyarakat lainnya justru memperoleh manfaat dari suatu kegiatan atau kebijakan (Race dan Millar 2006).

Gonsalves et al. (2005) mendeskripsikan pemangku kepentingan atas siapa yang memberi dampak dan / atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan. Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu kelompok tertentu.

Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok (Crosby 1992), yaitu: (1) Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif dari kegiatan ; (2) Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta ; (3) Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukannya penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyatakan bahwa pembangunan yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan

demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat di pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah kurangnya sumber penerangan. Dimana di daerah pesisir sangat sulit untuk mendapatkan penerangan lampu, karena sulitnya jangkauan listrik untuk sampai ke dalam.

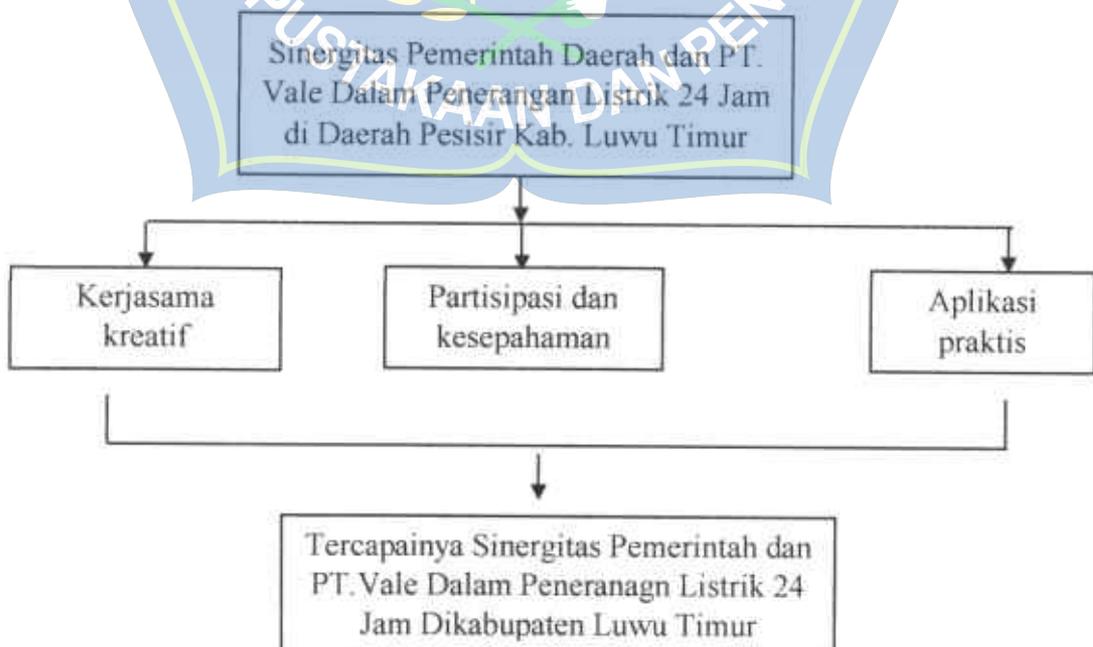
Melihat permasalahan tersebut, pemerintah daerah dan PT. Vale melakukan sinergitas guna untuk memberikan penerangan lampu selama 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, dengan menggunakan teori sinergitas, Kerjasama kreatif, partisipasi dan kesepahaman, aplikasi praktis, dan menghargai perbedaan (Covey's 2008)

1. Kerjasama Kreatif, Sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan.
2. Partisipasi dan kesepahaman, Berpikir menang-menang (*win / win concept*) menjadi motivasi dalam bekerja bersama guna mewujudkan tujuan yang di inginkan atau memahami nilai-nilai perbedaan masing-masing anggota. Dalam bersinergi, tidak ada pihak yang harus kalah dan tidak ada pihak yang harus dirugikan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih

besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergitas semua pihak harus saling berpikir positif untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk meraih kemenangan.

3. Aplikasi Praktis, Untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari suatu persaingan antar kelompok. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan dengan prinsip sinergitas harus memulai pekerjaan dengan pemikiran "kami". Dengan prinsip ini perasaan emosional dalam pekerjaan menjadi ukuran kemajuannya, dan ketulusan anggota secara langsung akan menjadi modal utama.

Gambar 2.1
Konsep Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT.Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah (1) Kerjasama, (2) Partisipasi dan kesepahaman, (3) aplikasi praktis

G. Deskripsi Pokus Penelitian

1. Kerjasama Kreatif

Sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan. Ada dua cara dimana setiap bagian menghasilkan nilai-nilai maksimum.

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan PT.Vale diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yakni UU sistem perencanaan pembangunan (UU No. 25 Tahun 2004). Peraturan Menteri dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Pembangunan Desa. Dalam merealisasikan program pembangunan masyarakat, PT.Vale dan Pemerintah berupaya untuk membangun khususnya desa mandiri, pembangunan khususnya desa lebih tercapai termasuk tujuan pembangunan.

kerjasama kreatif antara PT-Vale dan Pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Dimana PT-Vale sebagai perusahaan tambang nikel terbesar yang ada di Luwu Timur, menerapkan operasi yang ramah lingkungan dan produksi yang efisien dengan memenuhi sendiri kebutuhan listrik untuk proses produksi, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pengoperasian PLTA

menjadikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkurang, dengan cara ini dapat menjangkau rumah-rumah warga yang ada dipesisir.

2. Partisipasi dan Kesepahaman

Partisipasi dalam pengembangan harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua kalangan dapat di libatkan secara aktif dalam proses dan kegiatan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan PT.Vale, dimana mekanisme partisipasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak program sekaligus menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton atau penerima manfaat, melainkan sebagai program pengembangan masyarakat.

Pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, masyarakat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di libatkan langsung dalam program tersebut, karena Pemerintah menilai bahwa keberadaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung sangat dibutuhkan. Operasi PLTA yang dilakukan oleh PT Vale dan Pemerintah jelas memberikan dampak yang sangat besar, karena dapat memasok kebutuhan listrik yang sangat besar.

3. Aplikasi Praktis

Untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari suatu persaingan antar kelompok.

Dalam pengembangan sinergitas anatar pemerintah dan PT.Vale dibutuhkan suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan, sehingga mempoeoleh hasil yang lebih baik. Tujuan utama dari adanya senergitas anantara Pemerintah dan PT.Vale adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah pesisir tidak ada di Kab. Luwu Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama Dua Bulan, terhitung mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan September 2021. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian pada PT-Vale dan daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Sinergitas pemerintah daerah dan PT-Vale dalam pengadaan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir kabupaten Luwu timur dapat diperoleh di lokasi tersebut.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif yang memberikan gambaran Sinergitas pemerintah daerah dan PT.Vale dalam pengadaan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir kabupaten Luwu timur. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui

wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Sinergitas pemerintah daerah dan PT-Vale dalam pengadaan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir kabupaten Luwu timur

D. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *Purposive* yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN	KET
1	Ir. H. Zainuddin M. Si	ZD	Kepala Tata dinas Ruang dan Permukiman	1
2	Jante S.Pd	JT	Kepala bidang sarana dan prasarana	1
3	Megawati Ihya	MI	Bagian perizinan PT Vale	1
4	Irwandi, S.F	IW	Staf Dinas Tata Ruang	
5	Rahman	RM	Masyarakat	1
6	Wandi	WD	Masyarakat	1
7	Syahrir	SH	Masyarakat	1

Sumber : Hasil Kajian Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang berhubungan Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT-Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur

2. Observasi

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didapatkan

dilokasi penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dan sebagai bentuk lampiran proses pengambilan data maupun untuk menginput data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun pemeriksaan pengabsahan data dengan cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan waktu, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negative dan membercheck.

Sedangkan dengan cara triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain dilakukan pengecekan yang dapat melalui wawancara terhadap objek penelitian. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masi segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebil kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai

ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian yang lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. PT Vale

PT Vale Indonesia beroperasi di Sulawesi, Indonesia dan tidak memiliki anak perusahaan di negara lain. Selama tahun 2018 tidak ada perubahan signifikan terkait wilayah operasi maupun rantai pasokan.

Wilayah Operasi dan Luas Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk dengan total 118,017 Ha, Sulawesi Tengah Central Sulawesi 22,699 Ha 19%, Sulawesi Selatan South Sulawesi 70,566 Ha 60%, dan Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi 24,752 Ha 21%.

Selama 50 tahun hadir di Indonesia, PT Vale berhasil mempertahankan eksistensi sebagai salah satu perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral terbaik di Indonesia. Sejak awal beroperasi PT Vale telah membangun smelter dan tidak pernah mengekspor bijih. Dimulai dengan penjualan perdana nikel matte tahun 1978, tingkat produksi terus tumbuh dalam rentang waktu berikutnya. Volume produksi tertinggi dicapai tahun 2015 sebanyak 81.777 Ton, dan hingga tahun 2022 PT Vale menargetkan volume produksi tahunannya menjadi 90.000 Ton. Secara nyata, Perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia. Setiap tahun kami membayarkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lebih lanjut, melalui amandemen kontrak karya pada tahun 2014, PT Vale menaikkan setoran iuran

produksi (royalti) per tahun menjadi 2% dari semula 0,6%, dengan opsi kenaikan menjadi 3% ketika harga nikel mencapai AS\$21.000 per Ton. Realisasi pembayaran pajak dan PNBPN untuk tahun 2018 mencapai AS\$91,87 juta, meningkat 46% dibanding tahun 2017.

Eksistensi PT Vale selama setengah abad di Indonesia, tak terlepas dari komitmen kami pada pembangunan berkelanjutan. Melalui pembangunan berkelanjutan, PT Vale mendorong aktivitas operasi pengelolaan tambang sehingga meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selama setengah abad ini pula, Perusahaan terus bertanggung jawab melakukan penguatan kerjasama dengan pemerintah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat luas, sehingga dapat terus berkontribusi pada penguatan aspek sosial, pembangunan kompetensi ekonomi lokal, serta konservasi pelestarian dan lingkungan.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), PT Vale terus menyempurnakan proses persetujuan dalam berhubungan dengan pejabat pemerintah dan pihak ketiga. Tahun 2015 Perusahaan menerapkan Manual PT Vale, dan setahun kemudian penerapan Kode Etik Pemasok serta pengadaan berbasis teknologi informasi (*e-procurement*). PT Vale juga telah menerapkan Vale Whistleblower Channel (VWC), sebagai akses bagi semua pihak untuk menyampaikan laporan pelanggaran.

Di bidang pengelolaan lingkungan, sejak awal PT Vale berkomitmen menerapkan operasi yang efisien dan berwawasan lingkungan. Langkah strategis yang dilakukan adalah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air

(PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi proses produksi dan kegiatan penunjang. Saat ini PT Vale mengoperasikan tiga unit PLTA yakni PLTA Larona yang beroperasi tahun 1979, PLTA Balambano tahun 1999 dan PLTA Karebbe tahun 2011. Total daya listrik yang dihasilkan mencapai 365 *MegaWatt* (MW).

Pengoperasian PLTA membuat PT Vale mampu menekan biaya produksi nikel dalam matte, sehingga tetap dapat bertahan dari pengaruh volatilitas harga nikel dunia. Manfaat lain adalah reduksi emisi karbon yang signifikan, sehingga PT Vale turut berkontribusi pada upaya bersama untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, sebagian dari listrik yang dihasilkan, didistribusikan bagi masyarakat di Sorowako melalui PT PLN (Persero) setempat.

Di bidang sosial, dalam perjalanan 50 tahun di Indonesia, PT Vale terus menyempurnakan program-program pembangunan berkelanjutan. Tahun 2013 PT Vale menyusun Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PTPM ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pemberdayaan, dan disusun untuk periode 2013 – 2017, lalu dilanjutkan periode 2018 – 2022. Selain itu, kami juga memberikan dukungan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selama 50 tahun hadir di Indonesia, PT Vale telah tumbuh bersama dengan banyak perusahaan lokal sebagai bagian dari rantai pasok pengadaan

barang dan jasa. Untuk tahun 2018, ada 295 perusahaan lokal yang terlibat dalam pengadaan dengan nilai kontrak sekitar 12% dari total nilai kontrak pengadaan tahun 2018. Pelibatan pemasok lokal dan nasional mendorong peningkatan realisasi angka total kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 68,17%, meningkat dibanding angka TKDN 2017 sebesar 67,85%. Perusahaan lokal juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Kami juga terus menjaga komitmen pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan melakukan penyempurnaan berbagai ketentuan internal sebagai panduan bersama. Tahun 2013 PT Vale memberlakukan Contractor Safety Management System (CSMS) atau Sistem Manajemen Keselamatan Kerja untuk Kontraktor.

Pada aspek kesehatan kerja, sejak beroperasi, PT Vale telah membangun fasilitas kesehatan bagi karyawan dan keluarga mereka, serta masyarakat setempat. Tahun 1977 Perusahaan mengoperasikan Rumah Sakit (RS) INCO, yang kemudian menjadi tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat sekitar PT Vale. Untuk meningkatkan efektifitas layanan kesehatan di RS INCO, tahun 2018 pengelolaan rumah sakit diserahkan kepada pihak ketiga, yakni RS Awal Bros. Serah terima ini merupakan bentuk kepatuhan pada Undang-Undang (UU) No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2. Visi dan Misi PT Vale

a. Visi

Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

b. Misi

Mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT-Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur

PT.Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil, sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), perusahaan ini telah mengoperasikan tambang nikel *open pit* dan pabrik pengolahan di Sorowako, Sulawesi, sejak tahun 1968. Saat ini, menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. Sejak awal beroperasi PT. Vale Indonesia Tbk (PT.Vale) telah memegang visi sebagai perusahaan tambang yang peduli terhadap kelangsungan alam. Memproduksi nikel dengan penerapan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan termasuk dalam menciptakan energi bagi kebutuhan produksi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Setelah lebih dari empat dasawarsa beroperasi, kini PT-Vale memiliki tiga PLTA yakni,

Larona, Balambano, dan Karebbe yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik untuk mengoperasikan furnace (tanur peleburan dan pengolahan bijih nikel) di pusat pengolahan (process plant) di Sorowako.

Dalam pengadaan listrik, kerjasama PT Vale dengan pemerintah dimana mulai di rencanakan pada tahun 2014 dilima daerah pesisir Towuti. Bentuk kerjasamanya adalah pemerintah memberikan pembebasan lahan kepada 5 daerah yang akan mendapatkan penerangan listrik, sedangkan pasokan listriknya berasal dari PLT Pt Vale

Untuk sumber tenaganya, PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti.

Di sisi lain, ketiga PLTA juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir melalui sistem kontrol di pintu-pintu air tersebut. Hal itu diketahui bila curah hujan tinggi, debit air sungai dapat meluap dan dapat berdampak pada pemilik area pertanian di daerah hulu. Berdasarkan data 5 tahun terakhir mengenai peningkatan fungsi operasi peralatan pembangkit listrik tenaga air yang ada di 3 lokasi PLTA yaitu Larona, Balambano dan Karebbe telah terjadi peningkatan/improvement yang cukup signifikan melalui penambahan atau perbaikan peralatan yang ada. Kondisi ini mengharuskan personal yang ada harus mampu bersinergi.

dan misi dari Department Operation Of Hydro Plant. Akibat kondisi harga komoditas nickel di pasaran global dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus menurun membuat secara global PT.Vale Indonesia membatasi pelatihan teknis bagi karyawan yang ada saat ini, padahal di satu sisi pelatihan ini sangat di butuhkan bagi karywan khususnya di department *Utilities operation of hydro plant* agar visi dan misi. department tersebut dapat terus sejalan dengan strategi operasional yang di terapkan sehari-hari.

Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut Sinergitas Pemerintah Daerah Dan PT.Vale Dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam Di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur, berapa tahap-tahap diantaranya adalah (1) kerjasama kreatif (2) partisipasi dan kesepahaman dan (3) aplikasi praktis

1. Kerjasama Kreatif

Sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan. Ada dua cara dimana setiap bagian menghasilkan nilai-nilai maksimum.

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan PT-Vale diselaraskan dengan kebijakanm Pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembanguna yakni UU sistem perencanaan pembagunan (UU No. 25 Tahun 2004). Peraturan Menteri dalam Negri No. 66 Tahun 2007 tentang Pembangunan Desa. Dalam merealisasikan program pembangunan masyarakat, PT-Vale dan Pemerintah berupaya untuk membangun khususnya

desa mandiri, pembangunan khususnya desa lebih tercapai termasuk tujuan pembangunan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (TK) dalam wawancaranya terkait dengan kerjasama kreatif, sebagai berikut :

“Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan PT-Vale dalam upaya pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah untuk bagaimana masyarakat pesisir pantai juga dapat menikmati listrik 24 jam seperti di daerah-daerah lainnya. Ini juga termasuk dalam Peraturan Pemerintah untuk bagaimana membangun desa. PT Vale merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar yang ada di Luwu Timur, dan termasuk dalam salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi yang sangat besar untuk Luwu Timur. Dengan demikian, maka pemerintah dan PT Vale melakukan kerjasama untuk melakukan program pengadaan listrik 24 Jam” (Wawancara dengan ZD, 20 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang, dalam wawancaranya terkait dengan kerjasama kreatif :

“Terkait dengan program pengadaan penerangan listrik 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah bekerjasama dengan PT-Vale untuk bagaimana memberikan listrik 24 jam kepada daerah pesisir. Bentuk kerjasama yang terjalin adalah PT Vale dengan pemerintah dalam pengadaan listrik 24 Jam adalah dimana PT-Vale menerapkan operasi yang ramah lingkungan dan produksi yang efisien dengan memenuhi sendiri kebutuhan listrik untuk proses produksi, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pengoperasian PLTA menjadikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkurang, dengan cara ini dapat menjangkau rumah-rumah warga yang ada dipesisir”(Wawancara dengan JT, Tgl 21 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama kreatif antara PT-Vale dan Pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Dimana PT-Vale sebagai perusahaan tambang nikel terbesar yang ada di Luwu Timur, menerapkan operasi yang ramah lingkungan dan produksi yang efisien dengan

memenuhi sendiri kebutuhan listrik untuk proses produksi, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pengoperasian PLTA menjadikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkurang, dengan cara ini dapat menjangkau rumah-rumah warga yang ada dipesisir.

Sebagai salah satu perusahaan Nikel terbesar yang ada di Kabupaten Luwu Timur, melalui pengadaan listrik 24 Jam didaerah pesisir kabupaten Luwu Timur, PT-Vale telah melakukan banyak perubahan dalam bidang PLTA. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu narasumber dari perusahaan PT-Vale, dalam wawancaranya terkait dengan kerjasama kreatif sebagai berikut :

“Terkait dengan program pengadaan listrik 24 Jam dipesisir Kabupaten Luwu Timur, Keberadaan PLTA, pemanfaatan biodiesel dan inovasi berkelanjutan, telah mampu menekan biaya produksi nikel dalam matte AS\$7.456 per ton. Nilai tersebut relatif terjaga dibanding tahun 2018 sebesar AS\$7.110 per ton. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan mengoperasikan tiga unit PLTA dengan total kapasitas produksi listrik 365 MegaWatt (MW). Secara umum pada tahun 2019 produksi listrik dari operasional PLTA telah mampu memenuhi 100% dari kebutuhan energi untuk produksi nikel dalam matte, meski operasional PLTA Larona pada kuartal pertama 2019 tidak optimal karena ada pengerjaan Larona canal lining. Kondisi ini menyebabkan pasokan listrik berkurang sehingga Perseroan mengurangi produksi nikel matte pada kuartal pertama 2019, untuk menjaga tingkat biaya produksi. Produksi kembali normal pada kuartal kedua 2019 setelah pengerjaan Larona canal lining selesai dan PLTA Larona kembali beroperasi optimal. Hingga saat ini, berbagai macam perbaikan telah dilakukan sehingga sudah berjalan dengan optimal sehingga masyarakat juga dapat menikmati listrik selama 24 jam seperti masyarakat lain pada umumnya”(Wawancara dengan MI, Tgl 23 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Berkat adanya kerjasama yang terjalin antara PT-Vale dan Pemerintah, kami masyarakat pesisir pantai yang selama ini sangat kesulitan untuk mendapatkan aliran listrik saat ini sudah merasakan adanya listrik selama 24 jam. Meskipun saat pemasangan banyak masalah dan kendala yang terjadi, tetapi kami berterimakasih Karena kami juga dapat merasakan dengan sangat nyaman listrik menyala 24 jam di rumah kami” (Wawancara dengan RM, 25 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Selama ini kami sangat kesulitan dalam mendapatkan penerangan, karena tidak adanya aliran listrik yang masuk di daerah kami. Sekarang berkat kerjasama yang terjalin antara PT-Vale dan Pemerintah yang mengusahakan listrik masuk kedalam daerah kami, kami sekarang dapat menikmati listrik menyala selama 24 jam. Meskipun kadang terjadi pemadaman jika terjadi koslet dan segala macamnya” (Wawancara dengan WD, 25 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan mengoperasikan tiga unit PLTA dengan total kapasitas produksi listrik 365 MegaWatt (MW). Secara umum pada tahun 2019 produksi listrik dari operasional PLTA telah mampu memenuhi 100% dari kebutuhan energi untuk produksi nikel dalam matte. Berkat kerjasama tersebut, saat ini masyarakat di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur dapat merasakan lampu 24 jam menyala di rumah mereka, meskipun kadang terjadi pemadaman jika terdapat koslet atau kerusakan lainnya, yang dianggap itu adalah hal yang wajar.

2. Partisipasi dan Kesepahaman

Partisipasi dalam pengembangan harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua kalangan dapat di libatkan secara aktif dalam proses dan kegiatan yang di lakukan.

Dalam pelaksanaan sinergitas antara pemerintah daerah dan PT-Vale, dimana mekanisme partisipasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak program sekaligus menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton atau penerima manfaat, melainkan sebagai program pengembangan masyarakat.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pegawai Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Luwu Timur, dalam wawancaranya terkait dengan Partisipasi dan kesepahaman, sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program pengadaan listrik 24 Jam di Kabupaten Luwu Timur, yang memilki peranan penting dalam hal ini adalah masyarakat, masyarakat di jadikan sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan program tersebut. Kami sebagai pelaksana hanya melaksanakan tuga yang diberikan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat, selebihnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk bagaimana menjaga agar PLTA yang diberikan pemerintah dapat mereka jaga dengan baik. Selama pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir, kami sangat membutuhkan dan sangat melibatkan masyarakat dalam hal ini. Karena yang mengetahui rute dan kondisi lingkungan tersebut adalah masyarakat itu sendiri” (Wawancara dengan IW, 23 Agustus 2021).

hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu staf di perusahaan PT-Vale, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Operasional PLTA mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. Selama tahun 2021 PT Vale mendistribusikan 10,7 MW dari total produksi daya listrik yang dihasilkan PLTA, untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat Luwu Timur dan sekitarnya. Pendistribusian daya listrik tersebut dilakukan melalui PT PLN (Persero) setempat sesuai perjanjian kesepakatan dan ketentuan yang berlaku” (Wawancara dengan MI, Tgl 23 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya, terkait dengan partisipasi dan kesepahaman :

“Pada saat proses pemasangan listrik di desa kami, pemerintah memberikan keluasaan kepada kami untuk ikut langsung berpartisipasi dalam program tersebut. Pemerintah memberikan semua apa yang menjadi kebutuhan kami, memberikan pelayanan yang baik kepada kami, apa yang selama ini menjadi kebutuhan dan keluhan kami kepada pemerintah mereka lakukan dan penuhi” (Wawancara dengan SH, Tgl 26 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, masyarakat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di libatkan langsung dalam program tersebut, karena Pemerintah menilai bahwa keberadaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung sangat dibutuhkan. Operasi PLTA yang dilakukan oleh PT-Vale dan Pemerintah jelas memberikan dampak yang sangat besar, karena dapat memasok kebutuhan listrik yang sangat besar.

Sejak awal beroperasi PT-Vale Indonesia Tbk (PT-Vale) telah memegang visi sebagai perusahaan tambang yang peduli terhadap kelangsungan alam. Memproduksi nikel dengan penerapan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan termasuk dalam menciptakan energi bagi kebutuhan produksi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Setelah lebih

dari empat dasawarsa beroperasi, kini PT-Vale memiliki tiga PLTA yakni, Larona, Balambano, dan Karebbe yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik untuk mengoperasikan furnace (tanur peleburan dan pengolahan bijih nikel) di pusat pengolahan (process plant) di Sorowako.

Untuk sumber tenaganya, PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti.

Di sisi lain, ketiga PLTA juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir melalui sistem kontrol di pintu-pintu air tersebut. Hal itu diketahui bila curah hujan tinggi, debit air sungai dapat meluap dan dapat berdampak pada pemilik area pertanian di daerah hulu. Berdasarkan data 5 tahun terakhir mengenai peningkatan fungsi operasi peralatan pembangkit listrik tenaga air yang ada di 3 lokasi PLTA yaitu Larona, Balambano dan Karebbe telah terjadi peningkatan/improvement yang cukup signifikan melalui penambahan atau perbaikan peralatan yang ada. Kondisi ini mengharuskan personel operator yang ada harus mampu bersinergi dengan system yang ada sesuai dengan visi dan misi dari *Department Operation Of Hydro Plant*. Akibat kondisi harga komoditas nikel di pasaran global dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus menurun membuat secara global PT-Vale Indonesia membatasi pelatihan teknis bagi karyawan yang ada saat ini, padahal di satu sisi pelatihan ini sangat

di butuhkan bagi karyawan khususnya di department *Utilities operation of hydro plant* agar visi dan misi. department tersebut dapat terus sejalan dengan strategi operasional yang di terapkan sehari-hari.

Sesuai dengan wawancara yang di lakukan bersama dengan salah satu Staf PT-Vale dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Salah satu tujuan dari adanya program pengadaan listrik 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah untuk bagaimana masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam. Dalam pelaksanaan pengadaan listrik 24 jam tersebut, sumber tenaga yang digunakan adalah PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti. Di sisi lain, ketiga PLTA juga berfungsi sebagai bangunan pengendali banjir melalui sistem kontrol di pintu-pintu air tersebut. Hal itu diketahui bila curah hujan tinggi, debit air sungai dapat meluap dan dapat berdampak pada pemilik area pertanian di daerah hulu. Disinilah peranan masyarakat diperlukan, masyarakat di himbau dapat menjaga dan memperhatikan bangunan yang dipergunakan untuk menopang agar tidak terjadi bencana” (Wawancara dengan M1, 23 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Permukiman, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Salah satu sarana yang dipergunakan dalam melaksanakan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu timur adalah dengan memanfaatkan tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti. Peran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat, pemerintah, PT Vale dan semua kalangan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini dapat menjaga sumber penerangan tersebut. Jika terjadi masalah, maka akan berdampak

buruk kepada masyarakat itu sendiri karena listrik yang ada di daerahnya akan padam” (Wawancara dengan JT, Tgl 21 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Salah satu tujuan dari adanya program pengadaan listrik 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah untuk bagaimana masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam. Dalam pelaksanaan pengadaan listrik 24 jam tersebut, sumber tenaga yang digunakan adalah PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini, dimana masyarakat diberikan tugas untuk bagaimana menjaga agar sarana yang dipergunakan untuk membangkitkan listrik yang di salurkan ke daerah pesisir dapat berfungsi dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu masyarakat, dalam wawancaranya terkait dengan partisipasi sebagai berikut :

“Terkait dengan partisipasi, kami sebagai masyarakat ikut berpartisipasi secara andil dalam pelaksanaan program ini. Karena kami sebagai masyarakat sadar betul bahwa apa yang pemerintah lakukan ini adalah untuk kebaikan kami, untuk memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami sebagai masyarakat harus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah itu sendiri” (Wawancara dengan WD, 25 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Partisipasi sangat penting dalam pelaksanaan suatu program, apalagi bilah program itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. terkait dengan program pemerintah bersama dengan PT Vale untuk mengadakan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir, itu menjadi suatu hal yang sangat di tunggu-tunggu dan di butuhkan oleh masyarakat. bagaimana tidak, selama ini masyarakat di daerah pesisir sangat kesulitan dalam mendapatkan penerangan. Bentuk partisipasi yang kami lakukan sebagai masyarakat adalah dengan ikut andil dalam pelaksanaan program tersebut, membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut, serta mengikuti segala aturan dan arahan yang diberikan pemerintah sehingga pada saat pelaksanaannya, tidak terjadi hal yang tidak di inginkan” (Wawancara dengan SH, Tgl 26 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa terkait dengan partisipasi dalam pelaksanaan program penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, masyarakat sangat berpartisipasi secara aktif dalam hal tersebut. Salah satu sebab masyarakat harus ikut andil dalam program tersebut, karena masyarakat merupakan konsumen yang akan menikmati fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Jika suatu program dapat berjalan dengan baik dan memuaskan bagi konsumen, maka masyarakat harus dilibatkan di dalamnya untuk mengetahui bagaimana serta apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

3. Aplikasi Praktis

Untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari suatu persaingan antar kelompok.

Dalam pengembangan sinergitas antara pemerintah dan PT-Vale, dibutuhkan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan utama dari adanya sinergitas antara Pemerintah setempat dan PT-Vale adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah Pesisir yang ada di Kab. Luwu Timur.

Sesuai wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu Staf PT Vale dalam wawancaranya terkait dengan aplikasi praktis

“Dalam pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Luwu Timur, pemerintah dan PT Vale melakukan kerjasama dan memiliki keterikatan agar apa yang di harapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan sangat baik. Bentuk kerjasama yang paling kongkret adalah dimana pemerintah dan PT Vale memastikan semua keperluan yang akan di pergunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, aman untuk di pergunakan, juga tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitarnya” (Wawancara dengan MI, 21 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Kerjasama yang baik akan memberikan dampak yang baik pulah. Kerjasama yang dilakukan antara PT Vale dan Pemerintah terkait dengan pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Dimana saat ini masyarakat sudah dapat menikmati listrik 24 jam di rumah mereka masing-masing. Sealing itu, Pemerintah dan PT Vale juga memastikan bahwa alat pembangkit listrik PLTA yang dipergunakan juga aman untuk masyarakat sekitarnya, karena itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah (Wawancara dengan ZD, 23 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal aplikasi praktis, PT Vale dan Pemerintah melakukan sinergitas kerja sama yang baik, dengan tujuan untuk bagaimana masyarakat pesisir

dapat merasakan listrik 24 jam dapat menyalah di rumah mereka. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pembangkit listrik PLTA dengan menggunakan bantuan tenaga listrik uap yang sumbernya berasal dari danau yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang di alirkan ke rumah-rumah rakyat.

Sejak tahun 1979 PT-Vale telah mengoperasikan PLTA. Desain dan proses pembangunan bendungan sesuai desain kegempaan (seismic design) yang mengacu pada *Maximum Credible Earthquake* (MCE). PT Vale juga melakukan pembaharuan perizinan dan pengawasan keamanan bendungan sesuai regulasi. Perseroan telah melakukan studi dan konsultasi penerapan Rencana Tindak Darurat (RTD) sebagai antisipasi terjadinya bencana dari operasionalisasi ketiga PLTA, seperti diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2010 Tentang Bendungan dan PP No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

PT-Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dua kali menyelenggarakan RTD ini. Pertama, pada 13 Desember 2018 dan kedua, pada 11 Desember 2019 di Malili yang mengikutsertakan lima dusun di Desa Wewangriu dan Kelurahan Malili. PT-Vale juga memastikan adanya izin operasi PLTA/bendungan dan sertifikat keamanan bendungan yang diperoleh dari Komisi Keamanan Bendungan.

Rencana Tindak Darurat (RTD) merupakan aktivitas wajib yang perlu dilaksanakan PT-Vale selaku pemilik dan operator 3

PLTA/bendungan di Blok Sorowako. Kegiatan ini merupakan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan dan Dokumen Panduan RTD Bendungan Seri Sungai Larona yang telah disetujui dan ditandatangani PT Vale, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai dengan wawancara yang di lakukan bersama dengan Staf PT Vale, dalam wawancaranya terkait dengan aplikasi praktis sebagai berikut :

“Di bidang pengelolaan lingkungan, sejak awal PT Vale berkomitmen menerapkan operasi yang efisien dan berwawasan lingkungan. Langkah strategis yang dilakukan adalah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi proses produksi dan kegiatan penunjang. Saat ini PT Vale mengoperasikan tiga unit PLTA yakni PLTA Larona yang beroperasi tahun 1979, PLTA Balambano tahun 1999 dan PLTA Karebbe tahun 2011. Total daya listrik yang dihasilkan mencapai 365 MegaWatt (MW).” (Wawancara dengan MI, 21 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu staf Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pengoperasian PLTA membuat PT-Vale mampu menekan biaya produksi nikel dalam matte, sehingga tetap dapat bertahan dari pengaruh volatilitas harga nikel dunia. Manfaat lain adalah reduksi emisi karbon yang signifikan, sehingga PT Vale turut berkontribusi pada upaya bersama untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain itu, sebagian dari listrik yang dihasilkan, didistribusikan bagi masyarakat di Sorowako melalui PT PLN (Persero) setempat” (Wawancara dengan IW, Tgl 21 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa terkait dengan aplikasi praktis dalam pelaksanaan program penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, PT-Vale berkomitmen menerapkan operasi yang efisien dan berwawasan lingkungan. Langkah strategis yang dilakukan adalah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi proses produksi dan kegiatan penunjang.

Selama 50 tahun beroperasi di Indonesia, PT Vale melakukan sinergi kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan dinamika yang berkembang di tataran nasional dan global. Tahun 2013 PT Vale menyusun Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PTPM ditujukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pemberdayaan, dan disusun untuk periode 2013 – 2017, lalu dilanjutkan periode 2018 – 2022. PT-Vale juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dukungan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan sinergi dengan SDGs dilakukan melalui pengelolaan tambang berkelanjutan, sesuai prinsip-prinsip kerangka kerja *International Council on Mining and Metals*.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang di lakukan bersama dengan staf PT Vale dalam wawancaranya, sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, PT-Vale Menerapkan praktik bisnis yang etis dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, serta transparansi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam strategi perusahaan dan proses pengambilan keputusan” (Wawancara dengan MI, 21 Agustus 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Sarana Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, PT-Vale bersama dengan pemerintah bersinergi untuk Mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam kinerja sosial dan berkontribusi pada pengembangan sosial, ekonomi bagi negara dan komunitas setempat, serta memfasilitasi dan mendukung basis pengetahuan dan sistem untuk desain yang bertanggung jawab, penggunaan dan penggunaan ulang, daur ulang serta pengolahan produk yang mengandung logam dan mineral. Sealing itu juga Proaktif melibatkan para pemangku kepentingan pada tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan secara terbuka dan transparan. Secara efektif melaporkan dan melaksanakan verifikasi independen kemajuan dan kinerja” (Wawancara dengan JT, 23 Agustus 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa terkait dengan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan sinergitas PT-Vale dan Pemerintah, PT-Vale juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dukungan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan sinergi dengan SDGs dilakukan melalui pengelolaan tambang berkelanjutan, sesuai prinsip-prinsip kerangka kerja *International Council on Mining and Metals*, dengan menerapkan praktik bisnis yang etis dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, serta transparansi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam strategi perusahaan dan proses pengambilan keputusan.

C. PEMBAHASAN

1. Kerjasama Kreatif

Sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan. Ada dua cara dimana setiap bagian menghasilkan nilai-nilai maksimum.

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan PT-Vale diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembanguana yakni UU sistem perencanaan pembagunan (UU No. 25 Tahun 2004). Peraturan Menteri dalam Negeru No. 66 Tahun 2007 tentang Pembangunan Desa. Dalam merealisasikan program pembangunan masyarakat, PT.Vale dan Pemerintah berupaya untuk membangun khususnya desa mandiri, pembangunan khususnya desa lebih tercapai termasuk tujuan pembangunan.

Hasil temuan yang di dapatkan di lapangan terkait dengan kerjasama kreatif antara PT-Vale dan Pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Dimana PT-Vale sebagai perusahaan tambang nikel terbesar yang ada di Luwu Timur, menerapkan operasi yang ramah lingkungan dan produksi yang efisien dengan memenuhi sendiri kebutuhan listrik untuk proses produksi, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pengoperasian PLTA menjadikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkurang, dengan carah ini dapat menjangkau rumah-rumah warga yang ada dipesisir.

Tercatat sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan PT-Vale mengoperasikan tiga unit PLTA dengan total kapasitas produksi listrik 365 MegaWatt (MW). Secara umum pada tahun 2019 produksi listrik dari operasional PLTA telah mampu memenuhi 100% dari kebutuhan energi untuk produksi nikel dalam matte. Berkat kerjasama tersebut, saat ini masyarakat di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur dapat merasakan lampu 24 jam menyalah di rumah mereka, meskipun kadang terjadi pemadaman jika terdapat koslet atau kerusakan lainnya, yang dianggap itu adalah hal yang wajar.

2. Partisipasi dan Kesepahaman

Partisipasi dalam pengembangan harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua kalangan dapat di libatkan secara aktif dalam proses dan kegiatan yang di lakukan.

Dalam pelaksanaan sinergitas antara pemerintah daerah dan PT-Vale, dimana mekanisme partisipasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak program sekaligus menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton atau penerima manfaat, melainkan sebagai program pengembangan masyarakat.

Hasil temuan yang di dapatkan dilapangan Salah satu tujuan dari adanya program pengadaan listrik 24 Jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur adalah untuk bagaimana masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam. Dalam pelaksanaan pengadaan listrik 24 jam tersebut, sumber tenaga yang digunakan adalah PLTA mendapatkan dari tiga danau yang berada di Luwu

Timur, yakni Matano, Mahalona, dan Towuti yang mengalirkan air melalui Sungai Larona menuju turbin. Sedangkan untuk mengontrol level air Danau Matano, diatur melalui pintu-pintu air Petea. Bangunan ini terdiri atas 6 set pintu air yang dioperasikan secara manual berdasarkan kondisi level Danau Matano dan Towuti. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini, dimana masyarakat diberikan tugas untuk bagaimana menjaga agar sarana yang dipergunakan untuk membangkitkan listrik yang di salurkan ke daerah pesisir dapat berfungsi dengan baik.

Pelaksanaan program pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, masyarakat menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di libatkan langsung dalam program tersebut, karena Pemerintah menilai bahwa keberadaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung sangat dibutuhkan. Operasi PLTA yang dilakukan oleh PT Vale dan Pemerintah jelas memberikan dampak yang sangat besar, karena dapat memasok kebutuhan listrik yang sangat besar.

3. Aplikasi Praktis

Untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari suatu persaingan antar kelompok.

Dalam pengembangan sinergitas antara pemerintah dan PT-Vale, dibutuhkan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan utama

dari adanya sinergitas antara Pemerintah setempat dan PT-Vale adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah Pesisir yang ada di Kab. Luwu Timur.

Hasil yang di dapatkan dilapangan terkait dengan aplikasi praktis, PT-Vale dan Pemerintah melakukan sinergitas kerja sama yang baik, dengan tujuan untuk bagaimana masyarakat pesisir dapat merasakan listrik 24 jam dapat menyalah di rumah mereka. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pembangkit listrik PLTA dengan menggunakan bantuan tenaga listrik uap yang sumbernya berasal dari danau yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang di alirkan ke rumah-rumah rakyat.

PT-Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dua kali menyelenggarakan RTD ini. Pertama, pada 13 Desember 2018 dan kedua, pada 11 Desember 2019 di Malili yang mengikutsertakan lima dusun di Desa Wewangriu dan Kelurahan Malili. PT-Vale juga memastikan adanya izin operasi PLTA/bendungan dan sertifikat keamanan bendungan yang diperoleh dari Komisi Keamanan Bendungan.

Rencana Tindak Darurat (RTD) merupakan aktivitas wajib yang perlu dilaksanakan PT-Vale selaku pemilik dan operator 3 PLTA/bendungan di Blok Sorowako. Kegiatan ini merupakan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan dan Dokumen Panduan RTD Bendungan Seri Sungai Larona yang telah disetujui dan ditandatangani PT-Vale, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan sinergitas pemerintah daerah dan PT-Vale dalam pengadaan penerangan listrik 24 jam di daerah pesisir Kabupaten Luwu Timur, Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah dan PT-Vale diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yakni UU sistem perencanaan pembangunan (UU No. 25 Tahun 2004) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang pembangunan Desa. Dalam merealisasikan program pembangunan masyarakat, PT-Vale dan Pemerintah berupaya untuk membangun khususnya desa mandiri, pembangunan khususnya desa lebih tercapai termasuk tujuan pembangunan.

Dalam pelaksanaan sinergitas antara pemerintah daerah dan PT-Vale, dimana mekanisme partisipasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak program sekaligus menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton atau penerima manfaat, melainkan sebagai program pengembangan masyarakat.

Dalam pengembangan sinergitas antara pemerintah dan PT-Vale, suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan utama dari adanya

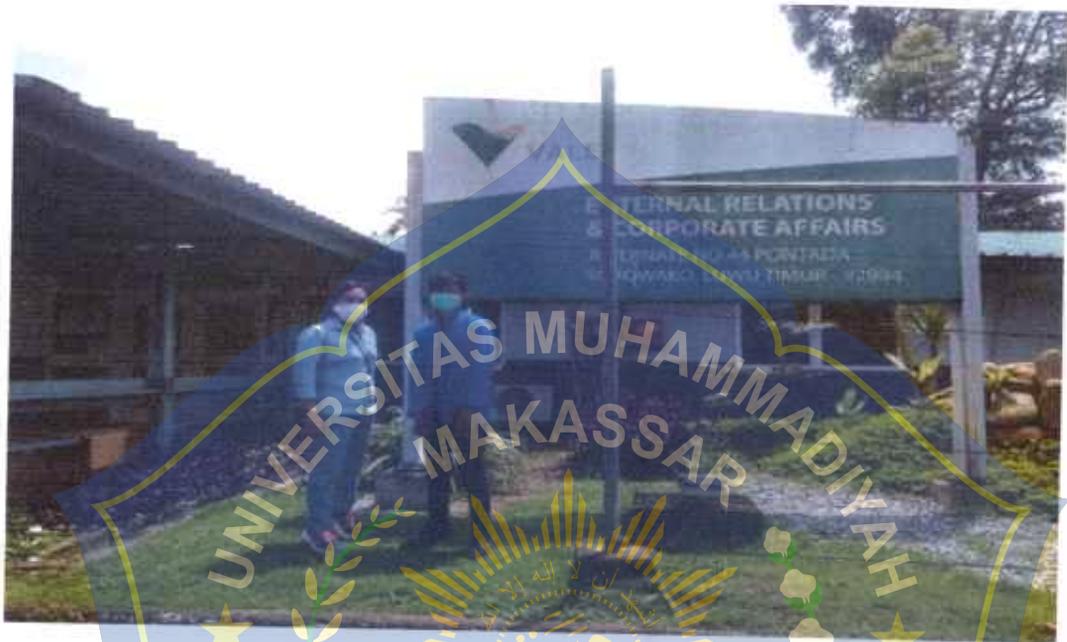
sinergitas antara Pemerintah setempat dan PT-Vale adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah Pesisir yang ada di Kab Luwu Timur.

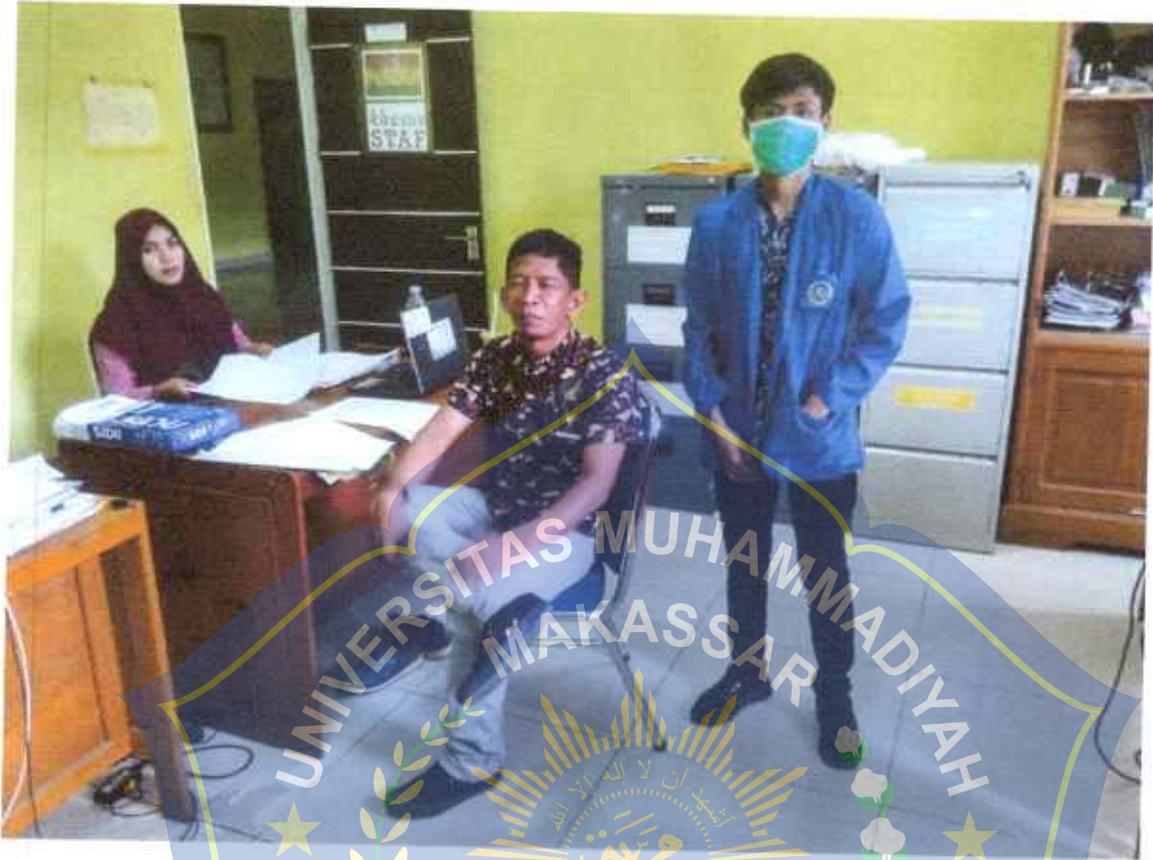
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang akan saya berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah atau instansi terkait seharusnya lebih produktif dan lebih memperhatikan kembali apa yang menjadi masalah dalam masyarakat terkait dengan pengadaan listrik 24 jam di daerah pesisir. Pemerintah harus mampu lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
2. Kepada masyarakat harus mampu menjaga dan memelihara segala fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk di pergunakan sebaik-baiknya untuk dapat di pergunakan dalam jangka waktu yang panjang.

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

EMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plaza.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 4301/05/C.4-VIII/VIII/40/2021
: 1 (satu) Rangkap Proposal
: Permohonan Izin Penelitian

01 Muharram 1443 H
09 August 2021 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Luwu Timur
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Luwu Timur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1123/FSP/A.1-VIII/VIII/42/2021 tanggal 9 Agustus 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RUSTAM
No. Stambuk : 10564 0206915
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Sinergitas Pemerintah Daerah dan PT. Valew dalam Pengadaan Penerangan Listrik 24 Jam di Daerah Pesisir Kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 Agustus 2021 s/d 11 Oktober 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716